

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi sangat pesat. Terbukti peran teknologi mengambil alih pekerjaan manusia. Penerapan teknologi dapat memudahkan pekerjaan manusia, mempersingkat jarak, serta menjalin komunikasi tanpa batas antar ruang dan waktu. Sehingga membuat teknologi menjadi daya tarik tersendiri bagi kemajuan negara. Negara akan maju jika memiliki tingkatan penggunaan teknologi yang tinggi. Namun hal ini harus didukung oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam penunjang kesuksesan organisasi. Dapat dikatakan sumber daya manusia memegang peran penting dalam menghasilkan kualitas output suatu organisasi.

Kualitas output suatu organisasi bisa dilihat dari tersedianya arus informasi yang cepat dan tepat. Dari informasi kita dapat mengetahui data dan fakta yang nantinya dapat dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Sebagai contoh dalam proses jual beli, sebelum pelanggan melakukan transaksi maka mereka harus mengetahui produk atau jasa yang akan didapatkan. Mereka cenderung mencari produk atau jasa dengan harga terjangkau tetapi dengan

kualitas yang tinggi. Para penjual harus mempromosikan atau membagi informasi yang dimiliki secara cepat dan tepat. Melalui teknologi penjual dapat dengan mudah mencapai target tujuannya. Hal ini didukung dengan fakta sensus pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia mayoritas dari pada penggunaan internet dalam rumah tangga yaitu sebesar 78,18% (Statistik, 2021).

Besarnya presentase pengguna internet, membuat pemerintah harus lebih melek akan hal ini. Teknologi bukan hanya memberikan manfaat secara fungsional semata, namun juga memberikan fleksibilitas bagi penggunanya. Di lingkungan publik, banyak instansi yang menggunakan teknologi sebagai media pelayanannya. Instansi pemerintah yang dikenal dengan birokrasi rumit dan berbeli-belit, sekarang mulai berubah kearah birokrasi yang fleksibel dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Dilansir dari berita MENPANRB (2021), Presiden Jokowi dalam sambutan acara *Launching Core Values dan Employee Branding* ASN secara virtual mengatakan penetapan *core value* ASN BerAKHLAK dilakukan sebagai upaya akselerasi transformasi ASN sehingga mewujudkan SDM yang memiliki profil pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai ilmu perkembangan dan teknologi. Dengan demikian membuktikan negara turut mendukung SDM agar bisa mendukung perkembangan teknologi.

Penerapan teknologi dalam pelayanan publik sebenarnya sudah diterapkan sejak 2003 yaitu dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Pada dasarnya penerapan *e-government* ditujukan agar pengguna teknologi informasi

dapat meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Implementasi dari *e-government* salah satunya dibuktikan dengan adanya keterbukaan atau transparansi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Pemerintah berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa adanya diskriminasi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman. Selain itu terciptanya *e-government* tidak terlepas dengan tujuan utama pelayanan publik yaitu *good governance*.

Good governance merupakan strategi penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban *good governance* salah satunya dibuktikan dengan adanya sistem informasi akuntansi yang memadai dengan tujuan untuk mengambil keputusan dan nantinya akan menjadi bahan evaluasi di masa mendatang.

Menurut Romney dan Steinbart (2018), sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang berfungsi mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menarik kesimpulan atas sebuah informasi. Sistem tersebut mencakup personel, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian dan keamanan internal. Sedangkan sistem informasi akuntansi berbasis komputer menurut Widiastuti (2015) adalah proses pengelolaan data atau transaksi yang meliputi penginputan, penyimpanan, dan pemrosesan data sehingga menghasilkan laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan dengan menggunakan sistem komputerisasi. Sistem informasi akuntansi terbagi menjadi beberapa siklus diantaranya siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus manajemen SDM atau penggajian, dan sistem

buku besar. Dalam penerapannya, salah satu siklus yang memiliki risiko terbesar akan timbulnya *fraud* adalah siklus pengeluaran. Sistem pengeluaran ini memiliki peranan terbesar dalam pengaturan pengeluaran aliran kas seminimal mungkin. Apalagi di masa pandemi seperti ini, perlu adanya kontrol untuk menunjang efektivitas dan efisiensi sistem pengeluaran.

Siklus pengeluaran yang telah dirancang sebaik mungkin bisa jadi mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena adanya ancaman dari pihak internal maupun eksternal. Hal ini perlu adanya sistem yang dapat memitigasi ancaman tersebut. Permasalahan kecurangan terkait siklus pengeluaran sangat marak terjadi di Indonesia mulai dari korupsi penyelewengan uang, duplikasi pembayaran, pencurian kas, perubahan cek, dan permasalahan arus kas lainnya. Berita yang sedang marak diperbincangkan saat ini adalah kasus korupsi bansos. Kasus korupsi bansos terbesar di Indonesia yang dijerat oleh Mantan Menteri Sosial merupakan salah satu dari banyaknya kasus yang terjadi di negeri ini. Bansos yang mulanya digunakan untuk bantuan sosial kesejahteraan masyarakat malah digunakan hal yang bukan sewajarnya. Selain itu, kasus penyimpangan belanja ini banyak ditemukan di beberapa satker di Indonesia. Contohnya kasus penyimpangan proyek E-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 T, dan kasus penyimpangan pembangunan wisma atlet dan RS Udayana yang merugikan keuangan negara sampai dengan Rp50 M.

Saat pandemi COVID 2019, kasus penyimpangan juga semakin marak dimana terdapat banyak celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sebagai contoh terdapat dokter dan seorang agen properti salah satu satker di Dinas

Kesehatan Medan Sumatra Utara telah melakukan pengalihan belanja peruntukan vaksin. Potensi ini muncul dikarenakan pengadaan barang yang bersifat darurat dan minimnya transparansi. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengelola sistem pengeluaran belanja agar tercipta pengendalian internal yang memadai.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah prosedur yang menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan dan dilaksanakan oleh seluruh pengguna sistem untuk menjamin tujuan pengendalian tercapai. SPI meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran untuk menjaga aset organisasi, pengecekan keandalan data akuntansi, dan pendorong kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016). Sedangkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Maruta (2016) adalah rancangan prosedur yang membentuk kebijakan manajemen sehingga menciptakan efisiensi operasional, perlindungan aset, serta mencegah penyimpangan terhadap aset perusahaan. Penerapan pengendalian internal siklus pengeluaran salah satu penunjang efektivitas dan efisiensi dalam sistem yang ada di lingkungan pemerintah.

Berdasarkan pada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 167 ayat (3): “Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan UU”. Ini artinya SPI di lingkungan pemerintah sudah mulai diberlakukan sejalan diterbitkannya undang-undang tersebut. Pengendalian diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai akan senantiasa terjaga dalam mencapai tujuan

bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustyawati, 2019). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penggunaan sistem terkomputerisasi dengan program aplikasi memberikan banyak otomatisasi pekerjaan penyusunan laporan keuangan. Pengendalian prosedur pengeluaran kas ini nantinya dapat meningkatkan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan.

Badan Narkotika Nasional yang biasa disingkat dengan istilah BNN merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas mewujudkan negara yang bebas akan narkoba. Adanya Keputusan Presiden No 17 tahun 2002 yang mana mengamanahkan BNN untuk mendapatkan alokasi anggaran dari APBN (Keputusan Presiden, 2002). Hal ini ditujukan guna meningkatkan kinerjanya agar berjalan optimal. Sejalan dengan hal tersebut mulai tahun 2022, BNN Kota Malang mengikuti arahan pemerintah dengan bersedia menggunakan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dalam pelaksanaan siklus pengeluaran sebagai penunjang penerapan sistem kerja yang optimal. Aplikasi ini berguna untuk menginput sistem pengeluaran melalui mekanisme uang persediaan ataupun pembayaran langsung (Subbag Umum BNN, 2021). Mengacu pada hal-hal di atas maka Penulis tertarik mengangkat judul “Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pengeluaran pada BNN Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran pada BNN Kota Malang?
- b. Bagaimana tinjauan atas sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran BNN Kota Malang dibandingkan dengan teori yang berlaku?
- c. Apakah penerapan pengendalian internal siklus pengeluaran pada BNN Kota Malang sudah memadai?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini yaitu untuk:

- a. Mengetahui penerapan siklus pengeluaran pada BNN Kota Malang.
- b. Mengetahui tinjauan atas sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran BNN Kota Malang dibandingkan dengan teori yang berlaku.
- c. Mengetahui penerapan pengendalian internal siklus pengeluaran pada BNN Kota Malang sudah memadai.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini terfokus pada lingkup pembahasan tinjauan sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran pada BNN Kota Malang dalam periode 1 tahun yang terhitung mulai Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Rencana tinjauan mencakup pelaksanaan siklus pengeluaran belanja mulai dari fungsi, prosedur, dokumen, dan sistem yang digunakan, serta pengendalian internal.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penerapan dan sistem pengendalian internal siklus pengeluaran pada BNN Kota Malang, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis yang dapat dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saram penulis dalam belajar mengimplementasikan pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi khususnya siklus pengeluaran belanja dan cara pengendalian internalnya.

b. Bagi PKN STAN

Penelitian ini diharapkan menambah referensi literatur di PKN STAN.

c. Bagi BNN Kota Malang

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BNN Kota Malang dalam meningkatkan pengendalian internal siklus pengeluaran.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan penulis bertujuan untuk mendapatkan data sekunder guna mendukung topik penulisan KTTA ini. Adapun sumber buku/literatur nantinya diperoleh dari peraturan perundang-

undangan, dokumen publik, karya ilmiah lainnya, dan buku-buku lainnya yang memiliki kaitannya dengan topik KTTA penulis.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan siklus pengeluaran belanja mulai dari fungsi, prosedur, dokumen, dan sistem yang digunakan, serta pengendalian internal.

3. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara dengan pegawai sub bagian umum BNN Kota Malang berkaitan dengan topik penulisan yaitu siklus pengeluaran, dokumen, serta sistem pengendaliannya. Wawancara ini dilakukan sebagai tahapan untuk mengetahui secara langsung proses implementasi sistem dan tata kelola dari pegawai yang bekerja di kantor tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disajikan mengenai gambaran umum KTTA yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Ruang Lingkup Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah teori serta pendapat ahli untuk mendukung tinjauan objek yang akan di bahas pada BAB III Adapun isi dari BAB

II meliputi Pengertian Sistem Informasi Akuntansi, Pengertian Siklus Pengeluaran, Konsep Pengendalian Internal.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan data-data hasil penelitian Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pengeluaran pada BNN Kota Malang yang kemudian dianalisis guna menjawab pertanyaan dari Rumusan Masalah.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV merupakan bagian akhir dari KTTA yang mana berisikan kesimpulan serta saran dari tinjauan yang telah dilakukan pada BAB sebelumnya.